

Peran Sekolah Rakyat dalam Pemerataan Akses Pendidikan bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Jember: Sebuah Studi Kualitatif

Lisa Kartika Rahmawati^{1)*}, Daryono²⁾, M. Bayu Firmansyah³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Universitas PGRI Wiranegara

lisapranata96@gmail.com, daryono.jarwo@gmail.com,
firmansyahbayu970@gmail.com

ABSTRAK: Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember. Meskipun pemerintah telah berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan, kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi hambatan signifikan yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi kelompok masyarakat terpinggirkan. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Sekolah Rakyat—sekolah alternatif yang diinisiasi masyarakat dan bebas biaya—berkontribusi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, minimnya sarana prasarana, serta eksklusi digital yang dialami peserta didik dari keluarga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperkuat kemampuan akademik dasar siswa, serta meningkatkan keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis komunitas memungkinkan sekolah ini mampu merespons kebutuhan belajar siswa yang berisiko putus sekolah dan mengalami marginalisasi sosial. Namun demikian, keberlanjutan penyelenggaraan Sekolah Rakyat masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, infrastruktur, serta minimnya pengakuan kelembagaan. Temuan ini menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan komunitas untuk memperkuat fungsi Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan yang inklusif guna mendorong mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kata Kunci: Pendidikan Berbasis Komunitas; Sekolah Alternatif; Akses Pendidikan; Keluarga Berpenghasilan Rendah; Sekolah Rakyat

ABSTRACT: This qualitative study aims to examine the role of the People's School (Sekolah Rakyat) in expanding access to education for children from low-income families in Jember Regency. Despite government efforts to achieve educational equality, socioeconomic disparities remain a significant barrier, limiting access to quality education services, particularly for marginalized groups. Through interviews, observations, and document analysis, this study explores how the People's School—a free, community-initiated alternative school—contributes to addressing resource constraints, inadequate infrastructure, and digital exclusion experienced by students from poor families. The results indicate that the People's School plays a significant role in increasing school participation, strengthening students' basic academic skills, and enhancing community involvement in education delivery. Its flexible, community-based learning approach enables the school to respond to the learning needs of students at risk of dropping out and experiencing social marginalization. However, the sustainability of the People's School still faces challenges such as limited funding and infrastructure, and a lack of institutional recognition. These findings underscore the importance of partnerships between the government and

communities to strengthen the function of People's Schools as an inclusive educational alternative to encourage social mobility and break the chain of intergenerational poverty.

Keywords: *community-based education; alternative schools; access to education; low-income families; People's Schools*

PENDAHULUAN

Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih menjadi permasalahan mendasar di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah (Hasyim, n.d.; Ta'dimatul Fatma, 2020). Keterbatasan ekonomi berdampak pada kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti buku pelajaran, seragam, perangkat digital, serta biaya operasional sekolah lainnya. Selain itu, sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah ekonomi tertinggal umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, sehingga memperlebar jurang kualitas pendidikan antara siswa miskin dan nonmiskin.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat, angka putus sekolah mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2023/2024 di seluruh jenjang pendidikan. Selain itu, sebesar 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah. Data dari Kementerian Pendidikan pada Januari 2025 juga menunjukkan bahwa sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya alternatif guna memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk inisiatif akar rumput yang menawarkan pendidikan bebas biaya dengan kurikulum fleksibel dan pendekatan berbasis komunitas. Model ini dinilai mampu menjangkau anak-anak yang mengalami hambatan ekonomi maupun sosial untuk mengakses sekolah formal. Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan layanan pendidikan alternatif, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Namun, keberlangsungannya masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya tenaga pendidik yang tersertifikasi, serta belum adanya penguatan kebijakan pendukung dari pemerintah.

Oleh karena itu, rumusan masalah artikel ini adalah a). Bagaimana peran Sekolah Rakyat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember. b). Apa saja tantangan yang dihadapi Sekolah Rakyat dalam menjalankan fungsi sebagai sekolah alternatif yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember (A. Muri Yusuf, 2016; Marbun et al., 2020). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada dua Sekolah Rakyat yang

memenuhi kriteria sebagai sekolah alternatif berbasis komunitas dan memberikan layanan pendidikan gratis minimal selama dua tahun. Partisipan penelitian terdiri atas pendiri/pengelola, guru atau relawan, orang tua siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta peserta didik yang berisiko putus sekolah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk menangkap pengalaman otentik, praktik pembelajaran, dan kondisi penyelenggaraan sekolah secara komprehensif.

Proses analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang selama pengumpulan data berlangsung. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking kepada partisipan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan konteks asli. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian sosial, termasuk persetujuan partisipasi secara sukarela dan kerahasiaan identitas informan. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan paparan yang valid dan mendalam mengenai kontribusi dan tantangan Sekolah Rakyat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember. Berdasarkan wawancara dengan pendiri sekolah, Sekolah Rakyat hadir sebagai respon terhadap meningkatnya angka putus sekolah yang disebabkan oleh hambatan ekonomi dan minimnya dukungan pembelajaran di rumah. Banyak siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah, bahkan untuk membeli seragam dan alat tulis dasar. Melalui penyelenggaraan pendidikan gratis, sekolah komunitas ini berhasil menjangkau anak-anak yang sebelumnya terputus dari layanan pendidikan formal, serta mengembalikan motivasi belajar siswa yang sempat hilang akibat kondisi sosial yang terpinggirkan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa relatif stabil meskipun sebagian dari mereka masih membantu pekerjaan orang tua seperti memulung atau bekerja serabutan di luar jam belajar. Penjadwalan pembelajaran yang fleksibel menjadi faktor penting yang memungkinkan anak-anak tetap dapat menempuh pendidikan tanpa meninggalkan peran mereka dalam membantu perekonomian keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan bagi kelompok rentan menuju hak pendidikan yang lebih berkeadilan, sekaligus memperkecil jarak akses pendidikan antara anak-anak miskin dan nonmiskin.

Selain meningkatkan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga berperan dalam penguatan kompetensi akademik dasar yang sering kali menjadi penyebab siswa tertinggal dan berisiko putus sekolah. Data yang dihimpun melalui observasi kelas

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang jauh di bawah standar usia sekolah. Oleh karena itu, sekolah ini menerapkan pendekatan pembelajaran remedial yang lebih personal dan berfokus pada kebutuhan belajar individu. Relawan pengajar memanfaatkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk mengatasi kejenuhan belajar yang kerap dialami siswa di sekolah formal. Kegiatan belajar mengajar juga mengintegrasikan praktik kehidupan sehari-hari, seperti simulasi berhitung dalam konteks jual beli dan latihan membaca melalui cerita rakyat setempat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, sebagaimana terlihat dari peningkatan kepercayaan diri dan keberanian mereka dalam berpartisipasi selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, keterlibatan komunitas turut memperkuat proses pendidikan, misalnya melalui pembinaan keluarga sadar pendidikan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mendorong anak tetap bersekolah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep pembelajaran berbasis komunitas memiliki efektivitas dalam meminimalkan hambatan akademik yang dialami siswa dari keluarga marginal sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah sebagai ruang aman untuk berkembang.

Dari sisi pemberdayaan komunitas, Sekolah Rakyat memberikan dampak sosial yang nyata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi tidak hanya terbatas pada dukungan fisik seperti penyediaan ruang belajar sederhana, tetapi juga keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Wawancara dengan orang tua siswa mengindikasikan adanya perubahan pola pikir terhadap pendidikan; yang awalnya dipandang sebagai beban ekonomi kini mulai dilihat sebagai jalan bagi peningkatan taraf hidup keluarga. Pengelola sekolah juga melaporkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat telah membangkitkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang selama ini memudar akibat tekanan ekonomi. Program pertemuan rutin yang melibatkan orang tua, kader pendidikan desa, dan relawan membantu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan serta penanganan hambatan belajar anak. Sekolah juga menjadi ruang bertemunya berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan humanis. Melalui praktik pendidikan berbasis komunitas, muncul nilai-nilai kemandirian, kerja sama, dan kepercayaan diri yang turut memperkuat kapasitas sosial masyarakat miskin dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya kesadaran kolektif terhadap urgensi pemerataan pendidikan.

Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang menghambat keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan jangka panjang. Tantangan utama terletak pada keterbatasan pendanaan yang membuat sekolah sulit berkembang dalam aspek sarana prasarana dan kelayakan pembelajaran. Guru dan relawan tidak memperoleh insentif memadai sehingga

mengandalkan idealisme dan solidaritas sosial dalam menjalankan peran kependidikan. Minimnya akses terhadap pelatihan guru turut berdampak pada belum optimalnya kualitas pembelajaran terutama dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses belajar. Selain itu, Sekolah Rakyat belum sepenuhnya mendapatkan legitimasi dan integrasi dalam sistem pendidikan formal, sehingga siswa menghadapi hambatan administrasi ketika ingin berpindah sekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kurangnya dukungan kebijakan yang berpihak pada inisiatif pendidikan berbasis komunitas membuat sekolah ini rentan mengalami stagnasi dan tidak memiliki keberlanjutan kelembagaan dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi dan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, khususnya dalam aspek pendanaan, pengembangan kapasitas pendidik, serta penguatan regulasi agar Sekolah Rakyat dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai model pendidikan alternatif yang berorientasi pada inklusi sosial. Dengan demikian, keberadaan Sekolah Rakyat memerlukan pendekatan kolaboratif dan kebijakan struktural yang menawarkan perlindungan, legitimasi, serta dukungan berkelanjutan untuk memastikan perannya dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan dapat berjalan secara konsisten dan berdampak jangka panjang.

Perluasan Akses Pendidikan: Sekolah Rakyat sebagai Mekanisme Inklusi Sosial

Berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan pendiri, guru, orang tua, dan siswa, jelas bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai mekanisme inklusi sosial bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember. Banyak siswa yang telah putus sekolah atau berada dalam risiko dropout berhasil kembali bersekolah karena biaya sekolah yang digratiskan, jadwal yang fleksibel, dan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal. Siswa yang sebelumnya membantu ekonomi keluarga—misalnya bekerja serabutan, membantu usaha orang tua, atau membantu pekerjaan rumah tangga—dapat tetap mengakses pendidikan tanpa beban biaya langsung maupun biaya tambahan seperti seragam, transportasi jauh, atau serangkaian biaya tidak resmi di sekolah formal. Selain itu, karena pendidikan diselenggarakan oleh komunitas sendiri, sekolah dapat menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi anak: jam belajar bisa diatur setelah anak membantu kerja keluarga, atau di luar waktu sibuk musiman ketika orang tua bekerja. Dengan demikian, Sekolah Rakyat mengurangi hambatan struktural dan ekonomi yang biasanya menjadi penghalang bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak.

Temuan ini serupa dengan penelitian “*community schools*” sebagai strategi efektif dalam memperluas akses pendidikan dan mendukung siswa dari komunitas berpenghasilan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi sekolah komunitas secara baik — yang menawarkan dukungan terpadu, keterlibatan keluarga, dan kesempatan belajar fleksibel — secara konsisten meningkatkan kehadiran siswa, menurunkan angka ketidakhadiran kronis, dan mengurangi risiko dropout di sekolah-sekolah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi (Matsushita, 2018; Mungmachon, 2012;

Sintiawati et al., 2022). Di konteks Jember, integrasi lokal melalui Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam budaya dan struktur sosial Indonesia, sehingga sekolah alternatif berbasis komunitas menjadi instrumen nyata untuk pemerataan akses — bukan sekadar idealisme. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal keberadaan sekolah formal — tetapi juga soal relevansi sosial, ketersediaan alternatif, dan kemudahan akses bagi kelompok yang paling rentan. Hal ini menegaskan bahwa intervensi akses pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan realitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai objek kebijakan.

Pembelajaran yang Responsif: Remedial, Kurikulum Kontekstual, dan Peran Modal Sosial Komunitas

Selain fungsi inklusi akses, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat berhasil mengatasi keterbatasan akademik yang sering dialami siswa dari keluarga miskin — seperti keterampilan dasar rendah, motivasi belajar menurun, dan ketertinggalan kurikulum (Andina, 2017; Daryono, Mochamad Bayu Firmansyah, 2021; Daryono, 2020). Observasi pembelajaran menunjukkan bahwa banyak siswa belum memiliki kemampuan dasar baca–tulis–hitung yang memadai sesuai usia. Oleh karena itu, sekolah menerapkan pendekatan pembelajaran remedial yang bersifat personal dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan ritme tiap siswa. Metode pembelajaran sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari — misalnya menghitung melalui simulasi jual beli, membaca dengan menggunakan cerita lokal atau cerita rakyat, atau diskusi kontekstual mengenai kondisi sosial di lingkungan mereka — sehingga materi terasa relevan dan memotivasi siswa.

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis komunitas (community-based education) yang dikemukakan dalam literatur nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Model Pendidikan Berbasis Komunitas” di Indonesia, sekolah komunitas memberikan ruang bagi kurikulum yang kontekstual, evaluasi yang berpusat pada siswa, dan partisipasi aktif masyarakat serta keluarga dalam proses pendidikan. Hal ini memperkuat sudut pandang bahwa pendidikan bukan hanya alat transfer pengetahuan formal tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan lokal — membentuk rasa percaya diri, relevansi sosial, dan keterikatan siswa dengan lingkungan komunitasnya (Habsy et al., 2023; Purwanto, Wahyu; Djatmika; Ery Tri ; Hariyono, 2016). Dari perspektif global, efek metode ini didukung oleh temuan riset terbaru tentang sekolah komunitas penuh layanan (*full-service community schools*): sekolah-sekolah tersebut melengkapi pendidikan akademik dengan dukungan sosial, layanan kesehatan, keterlibatan keluarga, dan kegiatan belajar di luar jam sekolah — sehingga siswa yang berasal dari lingkungan kurang beruntung bisa mengejar ketertinggalan akademik dan menghadapi hambatan non-akademik secara bersamaan (Gera et al., 2024; Tiezzi et al., 2003). Lebih jauh, perubahan dalam kehadiran, motivasi, dan keterlibatan siswa yang dipantau dalam riset-

riset tersebut erat berkaitan dengan peningkatan hasil akademik dalam jangka menengah. Dalam konteks Sekolah Rakyat di Jember, penerapan pembelajaran kontekstual dan remedial komunitas menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat — memperhatikan kebutuhan spesifik komunitas — sekolah alternatif dapat memberikan hasil yang signifikan dalam aspek kompetensi dasar dan keterlibatan siswa, meskipun dengan sumber daya terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya modal sosial komunitas (*social capital*) — yaitu jaringan orang tua, relawan, tokoh masyarakat, dan siswa — sebagai pendukung proses pendidikan, bukan hanya untuk akses tetapi juga untuk kualitas pembelajaran. Sekolah komunitas menjadi ruang kolektif tempat komunitas mengambil kepemilikan atas pendidikan anak-anak mereka, membangun solidaritas, dan mentransfer nilai-nilai lokal sekaligus keterampilan akademik.

Pemberdayaan Komunitas: Sekolah Rakyat sebagai Agen Perubahan Sosial

Sekolah Rakyat tidak hanya memenuhi fungsi pendidikan, tetapi juga berperan sebagai agen pemberdayaan komunitas dan mobilisasi sosial. Partisipasi orang tua, warga, relawan, dan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah — baik dalam hal dukungan sarana, pendanaan minimal, pengorganisasian jadwal, maupun pemantauan kehadiran — menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pendidikan generasi muda. Wawancara dengan orang tua siswa menunjukkan bahwa banyak dari mereka mulai memandang pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, bukan lagi beban ekonomi. Kesadaran ini menumbuhkan harapan dan motivasi kolektif untuk mendukung keberlangsungan sekolah.

Dari sudut pandang teori, ini bisa dijelaskan melalui kerangka pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) dan modal sosial. Pendidikan berbasis komunitas — sebagaimana digagas dalam literatur nasional — menekankan desentralisasi pendidikan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan potensi lokal sebagai inti dari model komunitas (Chusmeru & Kuncoro, 2020; Daryono, 2021b; Edi Karno, 2020; Rizal, 2014). Model semacam ini memungkinkan masyarakat untuk merebut kembali kontrol terhadap pendidikan anak-anaknya, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan membangun identitas sosial kolektif. Secara global, implementasi sekolah komunitas di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika komunitas dilibatkan secara aktif — dalam desain program, pelaksanaan, dan evaluasi — hasilnya lebih berkelanjutan. Ini karena komunitas menjadi mitra, bukan sekadar penerima bantuan. Dalam konteks Jember, Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa pendidikan bisa menjadi instrumen pemberdayaan: bukan hanya mendidik siswa, tetapi juga membangun kapasitas komunitas untuk mendukung pendidikan, merajut solidaritas sosial, dan memperkuat strategi kolektif untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat tidak bisa dipandang semata-mata sebagai alternatif pendidikan individual, tetapi sebagai strategi komunitas untuk pembangunan sosial dan mobilitas jangka panjang.

Pendanaan, Sumber Daya, dan Legitimasi Institusional

Meskipun banyak aspek positif, temuan penelitian juga mengungkap tantangan struktural yang dapat menghambat keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan jangka panjang. Pertama, pendanaan menjadi kendala serius: karena bergantung pada sukarela, donasi komunitas kecil, atau sumbangan tidak rutin dari orang tua murid (yang sendiri kadang dalam kondisi ekonomi rapuh), sekolah kesulitan memperbaiki sarana prasarana, menyediakan bahan ajar yang memadai, atau memperluas layanan seperti perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas digital. Banyak relawan pengajar yang bekerja tanpa insentif, sehingga keberlanjutan motivasi dan waktu pengajaran tergantung pada euforia awal dan kesadaran komunitas.

Tantangan kedua adalah kualitas pendidikan jangka panjang: tanpa pelatihan yang memadai bagi pengajar (misalnya dalam pedagogi, manajemen kelas, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran), metode remedial dan kontekstual mungkin sulit dipertahankan, atau hasilnya bisa stagnan bahkan menurun seiring waktu. Hal ini juga disebabkan oleh beban kerja ganda pengajar: selain mengajar, mereka seringkali melakukan tugas administrasi, koordinasi komunitas, dan pemenuhan kebutuhan non-akademik.

Ketiga, ada isu legitimasi dan pengakuan kelembagaan. Karena Sekolah Rakyat beroperasi sebagai inisiatif komunitas (nonformal / alternatif) dan seringkali belum diakui secara resmi dalam sistem pendidikan formal, siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang formal berikutnya (misalnya SMP ke SMA, atau ke sekolah formal negeri/swasta) menghadapi hambatan administratif: ijazah, sertifikasi, dan status kelulusan tidak selalu diakui. Ini membatasi mobilitas akademik siswa dan menimbulkan ketidakpastian apakah usaha belajar mereka akan dihargai oleh sistem pendidikan formal.

Temuan ini sesuai dengan kajian kritik terhadap sekolah komunitas global: meskipun banyak manfaat, tanpa integrasi struktural, kebijakan pendanaan, dan akreditasi formal, dampak jangka panjang dapat terhambat — dan komunitas kembali mengalami marginalisasi Pendidikan (Daryono, 2020, 2021a; Fitriah et al., 2024). Di Indonesia, literatur tentang pendidikan berbasis komunitas juga menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan dan kelembagaan, banyak inisiatif komunitas sulit berkembang, stagnan, atau bahkan terhenti. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa upaya pemberdayaan komunitas melalui pendidikan alternatif perlu diimbangi dengan dukungan struktural dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi jangka panjang.

Refleksi atas Paradigma Pendidikan

Temuan yang diperoleh dari Sekolah Rakyat membuka refleksi kritis terhadap paradigma pendidikan formal konvensional. Pendidikan formal seringkali menekankan kurikulum nasional yang seragam, standar akademik, dan mekanisme administratif — tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Dalam

konteks keluarga miskin di daerah seperti Kabupaten Jember, standar tersebut seringkali terasa eksklusif karena tidak adaptif terhadap kebutuhan dan keterbatasan siswa. Sekolah Rakyat, dengan pendekatan kontekstual dan fleksibel, menawarkan alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal: menggabungkan pendidikan akademik, keterampilan hidup, kearifan lokal, serta pembelajaran berbasis komunitas.

Pendekatan ini menyerupai konsep pendidikan inklusif dan demokratis — mengedepankan keberpihakan (equity), partisipasi komunitas, serta pemberdayaan potensi lokal. Literatur nasional tentang pendidikan berbasis masyarakat menekankan bahwa pendidikan semestinya “dibebaskan” dari belenggu formalitas yang mengekang; sebaliknya, diorientasikan pada pemberdayaan dan relevansi budaya lokal (Huda et al., 2025; Sabaruddin, 2022). Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan akses dan kualitas alternatif bagi siswa miskin, tetapi juga menjadi simbol resistensi terhadap ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan nasional — sebuah bentuk pendidikan akar rumput yang demokratis dan inklusif.

Namun demikian, tantangan keberlanjutan menunjukkan bahwa transformasi paradigma saja tidak cukup: tanpa pengakuan kelembagaan dan dukungan formal, model kontekstual dan komunitas sulit bersaing dengan dominasi sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan lokal — yang mengakui keanekaragaman sosial-ekonomi dan budaya bangsa — sekaligus tetap menjaga kualitas dan aksesibilitas secara luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember berperan signifikan dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang berisiko putus sekolah. Melalui pendekatan pembelajaran fleksibel, kurikulum kontekstual, serta dukungan berbasis komunitas, sekolah ini mampu mengurangi hambatan ekonomi, sosial, dan psikologis yang umumnya ditemui dalam sistem pendidikan formal. Selain memberikan layanan pendidikan dasar yang lebih setara, Sekolah Rakyat juga terbukti meningkatkan motivasi belajar, kompetensi literasi dan numerasi siswa, serta membangun modal sosial yang memperkuat kesadaran pendidikan dalam keluarga dan komunitas.

Untuk memastikan keberlanjutan dan memperluas dampak Sekolah Rakyat, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas. Pemerintah perlu menyediakan skema pendanaan khusus bagi sekolah berbasis komunitas, pelatihan profesional bagi pengajar dan relawan, serta mekanisme rekognisi pendidikan nonformal agar lulusan Sekolah Rakyat mendapatkan pengakuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Muri Yusuf. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Kesejahteraan Sosial*, 9–12. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=andina+2017+zonas+i&btnG=
- Chusmeru, C., & Kuncoro, B. (2020). Pengembangan Desa Ketahanan Pangan Menjadi Desa Eduwisata. *Prosiding*, 6(November), 37–50. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1193>
- Daryono, Mochamad Bayu Firmansyah, D. (2021). *Landasan Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Aspek Humas Pendidikan di Indonesia* (1st ed.). Ari Institute. https://books.google.co.id/books/about?id=hz8pEAAQBAJ&redir_esc=y
- Daryono. (2020). *Menuju Manajemen berbasis Sekolah* (M. Z. A. A. I. S.M (Ed.); 1st ed.). Lembaga Academic & Research Institute. <https://books.google.co.id/books?id=qkDZDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=PiqiVYxo oR&lr&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>
- Daryono, D. 2021. (2021a). Society 5.0 Fostering Spirituality and Humanity. In P. . Prof. Akhsanul In'am (Ed.), *Proceedings Of International Seminar Society 5.0 Fostering Spirituality and Humanity* (p. 275). Postgraduate University of Muhammadiyah Malang, Indonesia.
- Daryono, D. 2021. (2021b). *Society 5.0 Leading In The Borderless World* (D. Karmiyati (Ed.); 2021st ed.). CV. Bildung Nusantara, 2021.
- Edi Karno, S. (2020). *Community Participation at the Basic Education Level in Wakatobi Regency*. 26, 19–31. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/view/1785>
- Fitriah, L., Gaol, M. E. L., Cahyanti, N. R., Yamalia, N., Maharani, N., Iriani, I. T., & Surayanah, S. (2024). Pembelajaran Berbasis Pendekatan Culturally Responsive Teaching Di Sekolah Dasar. *JoLLA Journal of Language Literature and Arts*, 4(6), 643–650. <https://doi.org/10.17977/um064v4i62024p643-650>
- Gera, I. G., Ganjarjati, N. I., & Purbaningrum, D. (2024). Kepemimpinan Pelayanan Robert K. Greenleaf sebagai Model Manajemen Pendidikan yang Efektif dan Humanis. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1465–1472. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.888>
- Habsy, B. Al, Oktafiani, F., Salsabila, D. M., & Zahro, C. I. (2023). Teori Humanistik dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.162>
- Hasyim, A. (n.d.). *Pengembangan modul caring economics pada anak sekolah dasar_Hasyim_2018*.
-

- Huda, M. B., Faizi, A., & Saputra, B. B. (2025). Studi Komparatif Strategi Pembelajaran Inovatif: CRL ., TaRL .,. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 11(1), 563–573.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of education management to expediate supply chain management: A case of Indonesian higher educational institutions. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(1), 89–96.
- Matsushita, K. (2018). *Deep Active Learning*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5660-4>
- Mungmachon, M. R. (2012). Knowledge and Local Wisdom : Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), 174–181.
- Purwanto, Wahyu; Djatmika; Ery Tri ; Hariyono, A. (2016). *Konsep Model Pbm Sebagai Sebagai Pembiasaan Sikap Caring Economic Pada Proses Belajar Siswa* (P. S. P. E. G. S. of U. N. Tim Editor Malang (Ed.); pp. 1508–1517). Program Studi Pendidikan Ekonomi Graduate School of Universitas Negeri Malang. [https://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/ncee/search/authors/view?firstName=Laurentius&middleName=&lastName=Saptono&affiliation=Universitas Negeri Malang&country=](https://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/ncee/search/authors/view?firstName=Laurentius&middleName=&lastName=Saptono&affiliation=Universitas+Negeri+Malang&country=)
- Rizal, A. S. (2014). Filsafat Pendidikan Islam Islami *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 12(1), 1–18. http://jurnal.upi.edu/file/01_-_Landasan_Filosofis_Pendidikan_Islam_-_Rizal.pdf
- Sabaruddin, S. (2022). Pendidikan Indonesia Menghadapi Era 4.0. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 10(1), 43–49. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i1.29347>
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi Civitas Akademik dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2036>
- Ta'dimatul Fatma, A. M. D. (2020). *Persepsi Orang Tua Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pasuruan* (p. 9).
- Tiezzi, E., Marchettini, N., & Rosini, M. (2003). Extending the environmental wisdom beyond the local scenario: Eco-clynamic analysis and the learning community. *Advances in Ecological Sciences*, 18, 349–356.